



# Kontribusi Pesantren dalam Memfilter Modernisasi Sosial Budaya Masyarakat

## Abstract

*Pesantren (Islamic boarding school) as religious educational institutions as well as community, was able to play its role as a renewal precursor. The existence of Islamic boarding school in fact willing to give alternative bids model of education, thought and action. This proved to be Islamic boarding school as the oldest educational institutions and survive amid the current transformation of socialcultural swiftly. Sociocultural alteration can be overcome with five elements. These elements are the elements that can form a Islamic boarding school, that Kiai (priest), mosque, dormitories, santri (student of Islamic boarding school), and kitab kuning (classical textbook). These elements have a function as sociocultural education in shaping behavior of sociocultural.*

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan sekaligus kemasyarakatan, ternyata mampu memainkan peranannya sebagai pelo0(perubahan) sosial budaya masyarakat. Perubahan sosial budaya tersebut dapat diatasi dengan lima elemen. Elemen-elemen tersebut adalah unsur yang dapat membentuk pondok pesantren, yaitu kiai, masjid, asrama, santri, dan kitab kuning. Unsur-unsur yang membentuk pesantren tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam membentuk perilaku sosial budaya masyarakat.

**Kata kunci:** Pesantren, Modernisasi, Sosial Budaya, Masyarakat

Oleh

**Muhammad N. Hassan**

*Pengurus Biro Kajian Saintek LKP2M Periode 2013*

*Mahasiswa Jurusan Biologi UIN MalikI Malang*

## Pendahuluan

Pada era modernisasi sekarang ini, Alvin Toffler penulis buku *The Third Wave*, membayangkan akan terciptanya "masyarakat informasi" (*the information society*), sebagai dampak adanya abad informasi (*information age*) yang sulit dihindari oleh negara manapun, termasuk Indonesia. Sehingga fenomena globalisasi yang begitu cepat mengalami akselerasi dalam berbagai aspek, sebagai konsekuensi-logis dari penerapan teknologi

tinggi (*high-technology*), menyebabkan bangsa Indonesia tergiring pada pola interaksi yang amat cepat dan massif dengan negara-negara lain di dunia. Daniel Bell, menyebutnya dengan abad masyarakat pasca-industri (*the post industrialized society*).<sup>1</sup>

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia tidak saja memiliki peran strategis dalam

<sup>1</sup> Moh. Toriqul Chaer, 2013, *Inklusifisme Pesantren*, diakses dari <http://m.cyberdakwah.com/2013/07/inklusifisme-pesantren/>, pada tanggal 02 Oktober 2013 pukul 13:30 WIB

aspek pencerahan keilmuan. Namun ia juga merupakan lembaga pemberdayaan layaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia saat ini. Itu artinya pondok pesantren merupakan LSM tertua di Indonesia. Dengan demikian, multi peran pesantren memberikan harapan pesantren sebagai agen perubahan (*agent of change*), baik dalam aspek keilmuan, sosial, budaya, dan pemberdayaan ekonomi. Tidak berlebihan kiranya obsesi tersebut karena pesantren memiliki komponen-komponen bagi ekspektasi terhadap terjadinya perubahan. Berbagai komponen itu adalah diantaranya posisi kiai yang memiliki kharisma, budaya keilmuan yang selalu menuntut nilai-nilai idealisme, dan kemampuan memobilisasi massa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap suatu program. Sayangnya di beberapa pondok pesantren saat ini, komponen-komponen tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu bagi kepentingan hegemoni politik nasional.<sup>2</sup>

Lembaga ini juga semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertikal (dengan penyejalan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kekinian masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespon carut-marut 2 Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I, *Halaqah: Dari Pesantren untuk Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (dilansir dari SKH Kedaulatan Rakyat, Sabtu 28 Januari 2012).

persoalan masyarakat di sekitarnya.

Pergeseran orientasi semacam ini tidak berarti meraibkan identitas pesantren dengan segala keunikannya, melainkan justru semakin mempertegas bahwa pesantren sejak berdirinya adalah lembaga milik masyarakat yang dikembangkan atas swadaya masyarakat itu sendiri. Demikianlah dalam perkembangannya, pesantren semakin menyadari perlunya reintegrasi kehidupan di dalamnya dengan realitas di luarnya yang dalam masa-masa sebelumnya dua ranah ini demikian berjarak, untuk tidak mengatakan bersebrangan.

Dipihak yang lain, belantika<sup>3</sup> perkembangan pesantren sekarang ditandai dengan munculnya generasi baru. Generasi baru pesantren ini disamping tetap mewarisi tradisi keilmuan pesantren sebelumnya, juga berhasil meng-create tradisi yang sama sekali baru sekaligus berhasil mensinergikannya dengan perkembangan keilmuan mutakhir. Dengan demikian, lahirnya generasi baru tidak terlepas dari jaringan intelektual era sebelumnya, di samping juga berhasil membentuk jaringan yang sama sekali baru. Generasi baru ini dalam wujudnya berhasil membentuk *genre* baru dengan rantai intelektual yang baru pula yang kemudian dapat dibedakan dengan *genre* generasi sebelumnya. *Genre* generasi baru inilah yang saya sebut dengan *genre* intelektual pesantren era keemasan. *Genre* intelektual pesantren era keemasan ditandai dengan munculnya tradisi intelektual baru di dunia pesantren, sebuah tradisi yang tidak dijumpai dalam era-era sebelumnya (baik era pertumbuhan maupun era perkembangan pesantren).

3 **be·lan·ti·ka** n usaha dagang atau jasa dl dunia permusikan (lagu-lagu, kaset, dsb) atau pertunjukan (tari, dsb): -- *musik*

Kalau pada era sebelumnya, *genre* intelektual pesantren lebih menekankan pada transmisi mistisisme dalam arti yang sangat luas dan kemudian bergeser pada pemekaran kurikulum yang tidak melalui pada transmisi mistisisme dan pendalamannya, tetapi pada variasi kurikulum yang beragam. Namun pada era keemasannya, pesantren semakin memperluas ruang implementasinya dengan melengkapi dan menciptakan alternatif-alternatif baru yang dapat menopang destabilisasi<sup>4</sup> pesantren di tengah ancaman modernitas. Di era ini, pesantren berhasil menjadi lembaga pendidikan islam yang mondial<sup>5</sup> dan kosmopolitan<sup>6</sup>.

Oleh karenanya, pesantren telah mampu berperan dalam membentuk prilaku sosial budaya masyarakat dan memenuhi eksistensi kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.

### Mengenal Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis agama, pesantren pada mulanya merupakan pusat penggembangan nilai-nilai dan penyiaran agama islam. Namun, dalam perkembangannya, pesantren mengalami perubahan, yaitu perubahan dari dalam untuk kepentingan penunjukan identitas. Meskipun kepemimpinan dipegang oleh otoritas kiai sebagai sentral pesantren,

tetapi pesantren sebagai institusi sudah membuka diri bagi perubahan. Lihat saja bermula dari “*langgar*” atau mushola untuk tempat pengajaran, kemudian berkembang menjadi sebuah institusi modern, dengan kelas-kelasnya, dengan metodenya, dengan kurikulum bahkan dengan penataan organisasinya.

Pesantren mempunyai akar sejarah panjang, sekalipun pesantren-pesantren besar yang ada sekarang hanya dapat dilacak asal usulnya sampai akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Dalam hal ini Zamakhsyari Dhofier telah membuat peta pesantren-pesantren di Jawa dari abad ke-19 dan abad ke-20 yang menunjukkan adanya 40 pemasukanan pesantren dengan Jawa Timur sebagai pemegang terbesar, diikuti secara berurutan oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mengingat umurnya yang tua dan luasnya penyebaran pesantren, dapat dipahami bahwa pengaruh lembaga itu pada masyarakat sekitarnya sangat besar. Banyak peristiwa sejarah pada abad ke-19 yang menunjukkan betapa besar pengaruh pesantren dalam mobilisasi masyarakat pedesaan untuk aksi-aksi protes terhadap masuknya kekuasaan birokrasi kolonial di pedesaan. Dengan asumsi yang sama, sekarang ini pemerintah dan lembaga-lembaga swasta seperti LSM, mencoba meletakan harapan pada pesantren dalam usaha mereka memajukan pembangunan desa. Pesantren sebagai lembaga sosial yang berada di akar bawah mempunyai peranan strategis dalam melaksanakan cita-cita pembangunan yang memerlukan peran serta masyarakat dan perencanaan dari bawah.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> **de·sta·bi·li·sa·si** /déstabilisasi/ n perbuatan dsb yg menyebabkan tidak stabil (mantap); **men·de·sta·bi·li·sa·si** v menjadikan tidak stabil (mantap): tujuan gerakan para pemberontak ialah mencoba ~ pemerintahan yg baru

<sup>5</sup> **mon·di·al** a berkaitan dng seluruh dunia

<sup>6</sup> **kos·mo·po·li·tan** a 1 mempunyai wawasan dan pengetahuan yg luas; 2 terjadi dr orang-orang atau unsur-unsur yg berasal dr pelbagai bagian dunia

<sup>7</sup> Nurchois Madjid, *Buletin Bina Pesantren*, (Jakarta: Depag RI, 2009), hlm. 8-11

Lembaga pendidikan yang khas Indonesia (*indigenous*)<sup>8</sup> ini bisa dilacak sejak kehadiran dan da'wah Islam di Indonesia. Penyiaran Islam khususnya di Jawa relatif tidak menimbulkan problem konflikual karena proses akulturasi, akomodasi dan transformasi terhadap lembaga semisal yang telah eksis sebelumnya yang dimainkan oleh agama Hindu-Budha.<sup>9</sup> Ia merupakan pioner dan corong sosialisasi Islam di Indonesia dan bahkan pada era kolonialisme, pesantren tidak saja bermain dalam wilayah da'wah dan pendidikan akan tetapi juga secara signifikan telah memberikan kontribusi bagi terwujudnya iklim kemerdekaan.

Sejarah menunjukkan bahwa pesantren mempunyai akar tradisi yang sangat kuat di lingkungan masyarakat Indonesia. Ia merupakan produk budaya orisinal masyarakat Indonesia. Sejak awal kehadirannya pesantren telah menunjukkan watak populisnya dengan memberikan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua golongan masyarakat. Hal itu merupakan pengejawantahan dari konsep "*ummah*" dalam Islam yang menempatkan harkat dan martabat manusia secara egaliter di hadapan Tuhan. Karena itulah, dalam perjalanan sejarah keindonesiaan, pesantren tidak pernah lekang oleh waktu, bahkan secara kuantitas terus mengalami kenaikan.<sup>10</sup>

Karena itu masyarakat pesantren sejak awal merupakan komposisi besar

kelompok sosial budaya di Indonesia. Hal itu sebagaimana Geertz membagi kategori sosial masyarakat Jawa menjadi santri, priyayi dan abangan, walaupun pilahan sosial tersebut dalam era global semakin absurd. Selama ini kelompok santri yang terlembagakan dalam masyarakat pesantren identik dengan masyarakat tradisional. Berbeda dengan masyarakat modern, masyarakat tradisional merupakan kelompok terbesar dalam pelapisan sosial di Indonesia.

### **Pesantren dari masa ke masa**

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, pendidikan Islam merupakan kepentingan tinggi bagi kaum muslimin. Tetapi hanya sedikit sekali yang dapat kita ketahui tentang perkembangan pesantren di masa lalu, terutama sebelum Indonesia dijajah Belanda, karena dokumentasi sejarah sangat kurang. Bukti yang dapat kita pastikan menunjukkan bahwa pemerintah penjajahan Belanda memang membawa kemajuan teknologi ke Indonesia dan memperkenalkan sistem dan metode pendidikan baru. Namun, pemerintahan Belanda tidak melaksanakan kebijaksanaan yang mendorong sistem pendidikan yang sudah ada di Indonesia, yaitu sistem pendidikan Islam. Malah pemerintahan penjajahan Belanda membuat kebijaksanaan dan peraturan yang membatasi dan merugikan pendidikan Islam. Ini bisa kita lihat dari kebijaksanaan berikut:

Pada tahun 1882 pemerintah Belanda mendirikan Priesterreden (Pengadilan Agama) yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan pesantren. Tidak begitu lama setelah itu, dikeluarkan Ordonansi tahun 1905 yang berisi peraturan bahwa guru-guru agama yang akan mengajar

<sup>8</sup> Nurcholis Madjid yang dikutip oleh Hasan Mu'arif Ambari dalam, *Menemukan Peradaban; Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 319

<sup>9</sup> Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 145

<sup>10</sup> Husni Rahim, *Ibid*, hlm. 146

harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat.<sup>11</sup> Peraturan yang lebih ketat lagi dibuat pada tahun 1925 yang membatasi siapa yang boleh memberikan pelajaran mengaji. Akhirnya, pada tahun 1932 peraturan dikeluarkan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau yang memberikan pelajaran yang tak disukai oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Peraturan-peraturan tersebut membuktikan ketidakadilan dan tidak bijaksana pemerintah penjajahan Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Namun demikian, pendidikan pondok pesantren juga menghadapi tantangan pada masa kemerdekaan Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia mendorong pembangunan sekolah umum seluas-luasnya dan membuka secara luas jabatan-jabatan dalam administrasi modern bagi bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah-sekolah umum tersebut. Dampak kebijaksanaan itu adalah bahwa kekuatan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Indonesia menurun. Ini berarti jumlah anak-anak muda yang dulu tertarik kepada pendidikan pesantren menurun dibandingkan dengan anak-anak muda yang ingin mengikuti pendidikan sekolah umum yang baru saja diperluas. Akibatnya, banyak sekali pesantren-pesantren kecil mati sebab santrinya kurang cukup banyak.<sup>13</sup>

Jika kita melihat peraturan-peraturan tersebut baik yang dikeluarkan pemerintah Belanda selama bertahun-tahun maupun

11 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 41

12 Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). 149.

13 Zamakhsyari Dhofier, Op.Cit., hlm. 41

yang dibuat pemerintah RI, memang masuk akal untuk menarik kesimpulan bahwa perkembangan dan pertumbuhan sistem pendidikan Islam, dan terutama sistem pesantren, cukup pelan karena ternyata sangat terbatas. Akan tetapi, apa yang dapat disaksikan dalam sejarah adalah pertumbuhan pendidikan pesantren yang kuatnya dan pesatnya luar biasa. Seperti yang dikatakan Zuhairini (1997: 150), ternyata "jiwa Islam tetap terpelihara dengan baik" di Indonesia.

Menurut survei yang diselenggarakan kantor Urusan Agama yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang di Jawa tahun 1942 mencatat jumlah madrasah, pesantren dan murid-muridnya seperti terlihat berikutnya dalam Tabel 1:

TABEL 1<sup>14</sup>: Jumlah pesantren, madrasah dan santri di Jawa dan Madura pada tahun 1942 (Survai kantor Urusan Agama)

Propinsi Daerah	Jumlah Pesantren dan Madrasah	Jumlah Santri
Jakarta	167	14 513
Jawa Barat	1 046	69 954
Jawa Tengah	351	21 957
Tawa Timur	307	32 931
<b>Jumlah:</b>	<b>1 871</b>	<b>139 415</b>

TABEL 2<sup>15</sup>: Jumlah pesantren dan santri di Jawa pada tahun 1978. (Laporan Departemen Agama RI)

Propinsi Daerah	Jumlah Pesantren	Jumlah Santri
Jakarta	27	15 767
Jawa Barat	2 237	305 747

14 *Ibid*, hlm. 40

15 Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 140

Jawa Tengah	430	65 070
Tawa Timur	1 051	290 790
<b>Jumlah:</b>	<b>3 745</b>	<b>675 364</b>

Dalam Tabel 2, dapat kita melihat bahwa hampir empat dasawarsa kemudian, jumlah pesantren di Jawa telah bertambah kurang lebih empat kali. Statistik dari Tabel 2, yang dikumpulkan dari laporan Departemen Agama RI pada tahun 1978 yang mengenai keadaan pesantren di Jawa, menunjukkan bahwa sistem pendidikan pesantren di Jawa dipelihara, dikembangkan dan dihargai oleh masyarakat umat Islam di Indonesia. Kekuatan pondok pesantren dapat dilihat dari segi lain, yaitu walaupun setelah Indonesia merdeka telah berkembang jenis-jenis pendidikan Islam formal dalam bentuk madrasah dan pada tingkat tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), namun secara luas, kekuatan pendidikan Islam di Jawa masih berada pada sistem pesantren.<sup>16</sup>

Dari data-data tersebut harus kita bertanya, mengapa pesantren begitu sanggup menahan dan berkembang selama bertahun-tahun penuh dengan tantangan dan kesulitan yang dibuat baik pemerintah Belanda maupun pemerintah RI? Sistem pendidikan pondok pesantren mampu bertahan dan tetap berkembang karena siap menyesuaikan dan memoderenkan tergantung pada keadaan yang sebenarnya ada di Indonesia. Sejak awalnya, pesantren di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan tantangan karena dipengaruhi keadaan sosial, politik, dan perkembangan teknologi di Indonesia serta tuntutan dari masyarakat

<sup>16</sup> Zamakhsyari Dhozier, Op.Cit., hlm. 20

umum. Oleh karena itu, pada masa ini di dunia pesantren terjadi pembangunan sistem pendidikan pesantren modern yang berorientasi kepada pemberdayaan santri dan masyarakat.

Sehingga pesantren menjadi akar budaya yang dari dulu hingga sekarang sangat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Tjahjo Kumolo (2007), secara sosio demografi, masyarakat kita masih sangat menonjolkan perilaku ketokohan seseorang di dalam lingkungan pesantren. Dan diakui atau tidak, pesantren dengan berbagai bentuk dan variasi proses pembelajarannya, merupakan bagian dari peradaban bangsa yang telah melekat kuat dalam sejarah bangsa. Keunggulan pesantren terletak pada prinsip "memanusiakan manusia"<sup>17</sup> dalam proses pembelajarannya (M.H. Said Abdullah, 2007).

Sebagai lembaga pendidikan yang sangat berakar masyarakat pada umumnya pesantren hidup, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pesantren berusaha mendidik para santri, kemudian dapat mengajarkannya pada masyarakat. Eksistensi pesantren menjadi istimewa karena menjadi pendidikan alternatif (penyeimbang) pendidikan yang dikembangkan oleh kaum kolonial sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kaum intelektual yang berwawasan luas dengan landasan spiritual yang kuat.

Abdurrahman Wahid (1995) menjelaskan

<sup>17</sup> *Memanusiakan manusia* berarti perilaku manusia menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 32

pula bahwa pondok pesantren memegang prinsip dasar dalam menyikapi perubahan sebagai berikut: "Al-muhaafadzatu alal-qadiimi as-Shaalihu Wal-Akhidzu bin-Jadidiil Ashlah", yaitu memegang tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang lebih baik. Persoalan yang berpautan dengan *civic values* akan bisa dibenahi melalui prinsip-prinsip yang dipegang pesantren selama ini dan tentunya dengan perombakan yang efektif, berdaya guna, serta mampu memberikan kesejajaran sebagai umat manusia (*al musawah bain-nas*).

### Transformasi Perilaku Sosial Budaya

Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam konteks kajian ini, setidaknya ada dua istilah kunci yang perlu mendapat eksplanasi secara tepisah, yaitu: "sosial" dan "budaya". Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu rumusan definitif secara jelas tentang artikulasi perubahan sosial budaya.

*Konsep pertama* adalah konsep "sosial" atau sering disebut dengan masyarakat (*community*) yang berarti sekelompok ikatan nilai dan norma-norma sosial. Sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam satu tempat. Istilah sosial dapat juga diartikan sebagai wadah atau tempat orang-orang saling berhubungan dengan hukum dan budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama.<sup>18</sup> Sosial atau masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup dalam, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dan batas-batas yang

18 A. Sani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 23

dirumuskan dengan jelas, suatu masyarakat yang lebih terrefleksi dalam seni, sastra, religi dan moral.<sup>19</sup>

*Konsep kedua* dari term ini adalah konsep "budaya" yang selanjutnya mendapat afiks ke-an menjadi kebudayaan atau *culture*. Menurut Koentjaraningrat, kata kebudayaan berasal dari sansekerta buddhayah, ialah jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Sementara P.J. Van Der Peet, memandang bahwa asal kata "kebudayaan" merupakan perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang artinya daya dari budi, kekuatan dari akal. Istilah budaya sendiri dalam bahasa inggris berasal dari kata latin *colere*, yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti, *culture* sebagai segala daya dan usaha manusia untuk mengubah alam.<sup>20</sup>

Pada dasarnya suatu masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkannya tidak berhenti berproses, kecuali apabila masyarakat dan kebudayaan tersebut telah mati. Setiap masyarakat dan kebudayaan, pasti mengalami perubahan. Mungkin saja perubahan yang terjadi tidak begitu tampak, karena manusia kurang menyadarinya atau merasa dirinya kurang terlibat. Di Indonesia ini sering dikatakan bahwa, masyarakat desa sama sekali tidak berubah, atau suku-suku bangsa yang terasing, sama sekali masih murni. Ini semua sekali tidak benar, mungkin pandangan tersebut didasarkan pada sudut pandangan yang sangat sempit. Perkembangan ilmu pengetahuan dan

19 Titik Triwulan T, *Transformasi Sosial Budaya*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. 24

20 Titik Triwulan T, *Ibid*, hlm. 25

teknologi yang sangat pesat, hampir-hampir tidak memungkinkan manusia dan kelompoknya untuk menutup diri terhadap pengaruh dari luar. Memang perlu diakui di satu pihak pengaruh tersebut masuk dengan mudah, namun dipihak lain, ada pula pengaruh yang lebih sukar.

Transformasi perubahan sosial budaya dalam konteks ini adalah proses perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan pola pikir, gagasan dan ide-ide manusia mengakibatkan terjadinya perbedaan dengan keadaan sebelumnya dengan keadaan yang sedang dihadapi.<sup>21</sup> perubahan kebudayaan mencakup banyak aspek, baik nemtuk, sifat perubahan, dampak perubahan, dan mekanisme yang dilaluinya. Perubahan kebudayaan yang terjadi bias memunculkan masalah, antara lain perubahan akan merugikan manusia jika perubahan itu bersifat *regress* (kemunduran) bukan *progress* (kemajuan); perubahan bias berdampak buruk atau menjadi bencana jika dilakukan melalui revolusi, berlangsung cepat, dan di luar kendali manusia.<sup>22</sup>

Perubahan kebudayaan di dalamnya mencakup perkembangan kebudayaan. Pembangunan dan modernisasi termasuk pula perubahan kebudayaan. Pengertian modernisasi tersebut hendaknya dikaitkan dengan tujuannya, dan bukan terhadap caranya semata-mata pengaitan terhadap caranya semata-mata, mungkin menghasilkan kesalapahaman yang dapat menghasilkan sikap-sikap berprasangka terhadap kebudayaan tradisional maupun kebudayaan barat.<sup>23</sup>

---

21 A. Sani, *Op.Cit.*, hlm. 157

22 Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 32

23 Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Ja-

Keberhasilan modernisasi telah menunjukkan eksistensi yang sangat menjanjikan dan membanggakan. Terbukti, apa yang belum dikenal manusia, sekarang sudah tidak asing lagi. Bawa kelaparan dan penyakit menular yang dahulu sangat ditakuti, sekarang sudah dapat dihindari: kesulitan dan bahaya-bahaya alamiah yang dahulu menyakitkan dan menghambat perhubungan, sekarang bukan masalah lagi. Pendek kata, kemajuan *saintek* telah menghasilkan produk-produk yang memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dan kenikmatan, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak lagi pemenuhannya.

Kondisi dan hasil kemajuan *saintek* itu seharusnya membawa kebahagiaan dan kemaslahatan yang lebih banyak kepada manusia dalam kehidupannya. Akan tetapi suatu kenyataan yang menyedihkan, bahwa kebahagiaan itu ternyata semakin jauh, hidup semakin sukar dan kesukaran-kesukaran material berganti dengan kesukaran mental-spiritual. Beban jiwa semakin berat, kegelisahan dan ketegangan serta tekanan perasaan lebih sering terasa dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan.

Persoalan tersebut tidak lain adalah akibat terjajahnya bangsa oleh modernisasi dan globalisasi dalam arus yang semakin kuat. Sehingga saat ini tugas dan peran lembaga pendidikan dalam menggali ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi tanpa menghilangkan jati diri Indonesia melalui pelestarian nilai-nilai dan moral bangsa Indonesia.<sup>24</sup>

---

karta: Rajawali Pers, 1992), hlm 43-44

24 Elly M. Setiadi, *et al*, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 60-61

## Peran Pesantren dalam Membentuk Perilaku Sosial Budaya Masyarakat

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan sekaligus kemasyarakatan, pesantren ternyata mampu memainkan peranannya sebagai pelopor pembaruan. Keberadaan pesantren dalam kenyataannya sanggup memberikan tawaran alternatif model pendidikan, pemikiran dan tindakan. Pesantren terbukti sebagai institusi pendidikan yang paling lama dan bertahan ditengah derasnya arus perubahan sosial.

Pesantren merupakan perintis pendidikan islam di Indonesia, sehingga sudah sewajarnya menjadi panutan bagi pendidikan Islam secara makro. Apalagi belakangan pesantren yang juga mengakomodasi model pendidikan modern dengan kurikulum dan sistem pembelajarannya. Berbagai ilmu-ilmu di luar ilmu keagamaan sudah mulai di ajarkan di pesantren. Bahkan pembelajaran bahasa Inggris, selain bahasa Arab juga mulai di ajarkan di pesantren, tampaknya menjadi benar bahwa pesantren bukan saja tempat untuk mengkaji tiga ilmu agama, yaitu bahasa Arab, Fiqih dan Tauhid, tetapi ilmu *humanitis*, bahasa Inggris dan sejarah. Tentu tidak cukup itu saja, pesantren ternyata juga mengajarkan *soft skills* bagi santri-santrinya agar memiliki kesiapan memasuki dunia kerja.

Dalam pesantren terdapat berbagai unsur yang kemudian membentuk pokok pesantren, baik kiai, masjid, asrama, santri, dan kitab kuning. Menurut Dhofier (1985: 44-66) kelima elemen itulah menjadi elemen dasar dari tradisi pesantren. Melalui konstruksi dan relasi kelima elemen tersebut akhirnya pondok pesantren menciptakan dan membentuk perilaku sosial kebudayaan

yang mungkin berbeda dengan masyarakat lainnya di luar pesantren. Perilaku sosial kebudayaan tersebut terbentuk tidak hanya pada karakteristik fisik pesantren, melainkan juga bidang terbatas perilaku kebudayaan dari komunitas pesantren. Dalam konteks demikian, pesantren oleh Abdurrahman Wahid kemudian dianggap sebagai sebuah sub kultur dalam kultur masyarakat yang lebih luas.

Menurut Abdurrahman Wahid (1988: 40-47) unsur-unsur yang membentuk pesantren berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam membentuk perilaku sosial budaya. Peranan kiai dan santri dalam menjaga tradisi keagamaan dalam kurun waktu relatif panjang. Pola kebudayaan yang terbentuk tercipta sebagai sebuah kebiasaan atau tradisi yang muncul sebagai implikasi logis dari pola relasi dan fungsionalisme yang terjalin dalam komunitas pesantren.<sup>25</sup>

Sungguhpun demikian, pandangan-pandangan sumir terhadap kiai – biasanya dilakukan oleh para modernis dan puritan – tetap tak mampu menggeser pengaruh kiai di masyarakat. Keberadaan pesantren yang manunggal dengan lingkungan sekitarnya, memang unik. Ia seperti berada di wilayah periferi kekuasaan negara, sekaligus hadir di jantung masyarakat. Dan, sebagai figure sentral pesantren dan masyarakat, kiai dituntut bersikap kontekstual, fleksibel dan elastis menyikapi dinamika sosial, sekaligus menjaga agar jati diri dan sistem nilai pesantren tidak luntur. Dalam strategi sosial kebudayaan, kepercayaan diri *self confidence* yang berkelindan dengan sikap pertahanan diri (*self defensive*) seperti ini,

<sup>25</sup> Abdurohman Wahid, dalam Makalah Listiyono Santoso, *Kamampuan Internal Pesantren Mengakomodasi Perubahan*, (1988), hlm. 40-47

akan memberikan landasan kuat bagi transformasi sosial.<sup>26</sup>

Pelestarian tradisi dan budaya pesantren ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun karakter bangsa. Tiga hal yang ingin dicapai, dari acara tersebut yakni, pertama menegaskan budaya pesantren, sebagai sub kultur Indonesia yang lebih adaptatif dan menghargai tradisi serta kearifan budaya lokal, kedua, mengembalikan akar budaya Indonesia yang cinta damai, toleran, ramah.<sup>27</sup>

Saat ini pesantren justru lebih banyak terjebak dalam perjuangan kepentingan yang bersifat pragmatis oportunistis, terlebih lagi pada era pasca Orde Baru, terutama sekali pada saat-saat menjelang Pemilu. Pesantren dalam banyak kesempatan justru menjadi ajang pertarungan kepentingan perebutan kekuasaan atas nama agama. Generasi masa lalu menjadikan politik sebagai media memperjuangkan kepentingan agama, saat ini justru agama dijadikan “tunggangan” kepentingan politik. Ini bisa terjadi karena Pesantren tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam konstalasi perubahan sosial yang sedang berlangsung. Pesantren saat ini ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah gelombang laut dengan tanpa tujuan. Ia akan berlayar menuju ke tempat yang diinginkan oleh nahkodanya. Di tengah arus perubahan tata nilai sosial-budaya seperti sekarang ini, Pesantren tampak tidak

memiliki *sense of crisis* sama sekali.<sup>28</sup>

Pesantren memiliki karakteristik tersendiri yang khas yang hingga saat ini menunjukkan kemampuannya yang cemerlang melewati berbagai episode zaman dengan kemajemukan masalah yang dihadapinya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, ia telah memberikan andil yang sangat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat.

Salah satu hal yang membuat pesantren di Indonesia tetap bertahan adalah ia tetap mempertahankan budaya (budaya pesantren), kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *cultural-determinism*.<sup>29</sup>

Pesantren dianggap sebagai instrumen penting. Sebab, pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan “pendidikan” sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang dididiknya, dan mampu menjadi “guiding light” bagi generasi muda penerus bangsa.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi

28 Drs. Yasmadi, M.A., *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 61

29 Arifur Rahman, *Pesantren Budaya Sebagai Pusat Kegiatan Pondok Pesantren di Singosari*, (Malang: Tugas Akhir Jurusan Teknik Arsitektur UIN MALLANG, 2011)

30 Syamsul Ma’arif, *Transformative Learning dalam Membangun Pesantren Berbasis Multikultural*, (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012), hlm. 8

26 Rizal Mumazziq, *Cermin Bening dari Pesantren; Potret Keteladanan Para Kiai*, (Surabaya: Khalista, 2009) Resensi oleh A. Khoirul Anam, Santri Pesantren Ciganjur, 2010.

27 Nusron, dalam acara Festival Budaya Pesantren bertajuk “Dari Pesantren untuk Bangsa, Merevitalisasi Tradisi dan Menghargai Budaya Lokal”, (Kegiatan tersebut dihelat untuk memperingati Harlah ke-79 Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Jakarta, 2013)

nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya.

Sehingga eksistensi pesantren di tengah-tengah masyarakat mampu menjadikan kehadiran pesantren tetap menjadi idaman masyarakat di tengah penggerusan moral yang diakibatkan oleh budaya konsumeris. Strategi budaya yang dimainkan pesantren terbukti efektif dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan moralitas di samping pada saat yang sama terus berusaha mengapresiasi sekaligus berkreasi menciptakan nilai-nilai baru yang mungkin menopang keberlangsungan tradisi pesantren.

Demikianlah, pesantren dengan ragam variannya terus berusaha menciptakan strategi-strategi baru untuk terus menyumbangkan kemampuannya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi-strategi itu terus diujiterapkan sesuai dengan skala prioritas dan tantangan masing-masing pesantren.<sup>31</sup> Oleh karenanya masyarakat diharapkan mempercayai pondok pesantren mampu hadir sebagai solusi transformasi sosial budaya.

## Penutup

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang komplit memenuhi berbagai aspek, terutama aspek pendidikan moral dan karakter. Meskipun dewasa ini segala

<sup>31</sup> Mastuki, M.A., *Intelektualisme Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm. 7

cakupan mengenai kehidupan tidak bisa terlepas dari perubahan-perubahan nilai akibat globalisasi. Akan tetapi, pondok pesantren dengan pendidikan di dalamnya dinilai mampu menciptakan dan membentuk perilaku sosial budaya masyarakat.

Hal demikian dikarenakan pesantren terdapat berbagai unsur yang kemudian membentuk pokok pesantren, baik kiai, masjid, asrama, santri, dan kitab kuning. Kelima elemen itulah menjadi elemen dasar dari tradisi pesantren. Melalui konstruksi dan relasi kelima elemen tersebut akhirnya pondok pesantren menciptakan dan membentuk perilaku sosial kebudayaan yang bisa jadi berbeda dengan masyarakat lainnya di luar pesantren.

Perilaku sosial kebudayaan tersebut terbentuk tidak hanya pada karakteristik fisik pesantren, melainkan juga bidang terbatas perilaku kebudayaan dari komunitas pesantren. Dalam konteks demikian, pesantren oleh Abdurrahman Wahid kemudian dianggap sebagai sebuah sub kultur dalam kultur masyarakat yang lebih luas.

Harapannya, pondok pesantren benar-benar mampu hadir berkontribusi dalam transformasi sosial budaya dan sebagai solusi mengurangi budaya konsumtif masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengilangkan asumsi tentang citra pesantren sebagai pendidikan yang ketinggalan zaman, dan kehadiran pesantren tetap menjadi idaman masyarakat di tengah penggerusan budaya yang diakibatkan oleh peradaban global.

## Daftar Pustaka

Abdullah, Said. 2007. *Pesantren, Jati diri dan Pencerahan Masyarakat*. Sumenep: Said

- Abdullah Institute Publishing
- Chaer, Moh. Toriqul. 2013. *Inklusifisme Pesantren*. diakses dari <http://m.cyberdakwah.com/2013/07/inklusifisme-pesantren/> pada tanggal 02 Oktober 2013 pukul 13:30 WIB
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES
- Haji, Maskul. *Halaqah: Dari Pesantren untuk Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (dilansir dari SKH Kedaulatan Rakyat, Sabtu 28 Januari 2012)
- Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ma'arif, Syamsul. *Transformative Learning dalam Membangun Pesantren Berbasis Multikultural*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012. hal. 8
- Madjid, Nurcholis. 2006. *Buletin Bina Pesantren*. Jakarta: Depag RI
- Madjid, Nurcholis (yang dikutip oleh Hasan Mu'arif Ambari). 2001. *Menemukan Peradaban; Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos
- Mastuki. 2006. *Intelektualisme Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka
- Mumazziq, Rizal. 2009. *Cermin Bening dari Pesantren; Potret Keteladanan Para Kiai*. Surabaya: Khalista
- Nusron. 2013. *Dari Pesantren untuk Bangsa, Merevitalisasi Tradisi dan Menghargai Budaya Lokal*. Jakarta: Festival Budaya
- Pesantren, Harlah ke-79 Gerakan Pemuda (GP) Ansor
- Rahim, Husni. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos
- Rahman, Arifur. 2011. *Pesantren Budaya Sebagai Pusat Kegiatan Pondok Pesantren di Singosari*. Malang: Tugas Akhir Jurusan Teknik Arsitektur UIN Malang
- Setiadi, Elly M., et al. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sani, A. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Triwulan T., Titik. 2008. *Transformasi Sosial Budaya*. Jakarta: Lintas Pustaka
- Wahid, Abdurrahman. 1995. *Pesantren Sebagai Subkultural, dalam Pesantren dan Pembaruan*. Jakarta: LP3ES
- Wahid, Abdurrahman. 1988. *Kamampuan Internal Pesantren Mengakomodasi Perubahan*. (dalam Makalah Listiyono Santoso)
- Yasmadi, Drs., MA. 2002. *Modernisasi Pesantren*. Jakarta: Ciputat Press
- Zuhairini. 1997. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara